

PENERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN DENGAN ANGGARAN SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN BIAYA

Armanda Yusram Teruna

Mahasiswa Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Trisakti, Indonesia

Corresponding author email: d.armandateruna@gmail.com

Moh Yasin Noor

Politeknik LP3I Makassar, Indonesia

Email: yasinred13@gmail.com

ABSTRACT

Based on the phenomenon that occurs, the conditions of accountability are often inappropriate, the occurrence of deviations between the budget and its realization is due to the fact that the level of accountability has not been arranged from the lowest level to the highest level in each function. In order for the implementation of responsibility accounting to run well, several things that need to be considered are the requirements for the application of responsibility accounting. This type of research uses a quantitative approach with descriptive analysis methods. The research was conducted from May to July 2020. From the research, the results show that: 1) The requirements and characteristics in the application of accountability accounting in Bontoa District have been fulfilled because they have complied with the requirements and characteristics of accountability accounting based on existing theories and 2) Accountability accounting also plays an important role in cost control because in Accountability is a cost center where management is given responsibility for controlling costs and for making decisions that affect those costs.

Kata Kunci: Accountability Accounting, Budgeting, Cost Control.

ABSTRAK

Berdasarkan fenomena yang terjadi, kondisi pertanggungjawaban sering tidak sesuai, terjadinya penyimpangan antara anggaran dan realisasinya dikarenakan belum tersusunnya jenjang pertanggungjawaban dari jenjang terendah ke jenjang tertinggi pada tiap fungsinya. Agar penerapan akuntansi pertanggungjawaban berjalan dengan baik, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah

syarat penerapan akuntansi pertanggungjawaban. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis deskriptif. Penelitian dilakukan sejak bulan Mei sampai dengan Juli 2020. Dari penelitian diperoleh hasil bahwa: 1) Syarat-syarat dan karakteristik dalam penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada Kecamatan Bontoa telah terpenuhi karena telah sesuai syarat-syarat dan karakteristik akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan teori yang telah ada dan 2) Akuntansi pertanggungjawaban juga berperan penting dalam pengendalian biaya karena dalam pertanggungjawaban terdapat pusat biaya dimana pimpinan di berikan tanggungjawab untuk mengendalikan biaya dan untuk mengambil keputusan yang mempengaruhi biaya tersebut.

Kata Kunci: Akuntansi Pertanggungjawaban, Anggaran, Pengendalian Biaya.

PENDAHULUAN

Pemerintah adalah entitas publik yang memiliki tanggung jawab dalam setiap kegiatan dan kinerja. Salah satu tanggung jawab pemerintah adalah laporan keuangan dan wajib melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan tata tertib dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses pengendalian manajemen yang dilakukan oleh pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota adalah dengan melakukan penganggaran. Penganggaran adalah proses alokasi sumber daya yang terbatas untuk permintaan yang tidak terbatas (Freeman dan Shoulders, 2003:94). Kantor Kecamatan Bontoa memiliki tugas pokok melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan di bidang pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta uraian tugas pokok yang dilakukan pemegang jabatan oleh Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Peranan akuntansi sangat dibutuhkan dalam memperoleh informasi, peranan dari berbagai pihak juga dibutuhkan dalam mewujudkan peranan akuntansi dalam pengawasan biaya-biaya maka dibutuhkan adanya pengendalian yang disebut akuntansi pertanggungjawaban.

Anggaran merupakan rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, mengenai perolehan dan penggunaan sumber-sumber organisasi beserta pusat-pusat pertanggungjawaban untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas dalam

jangka waktu tertentu yang umumnya satu tahun (Anthony dan Govindarajan, 2009:73). Anggaran merupakan rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam periode satu tahun yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Anggaran daerah dapat digunakan sebagai alat perencanaan dan sebagai alat kontrol bagi pemerintah daerah. Sebagai alat untuk perencanaan anggaran, dapat digunakan untuk merencanakan berbagai kegiatan yang berorientasi pada tanggung jawab, yang pelaksanaannya mengikuti jalur yang telah ditetapkan.

Menurut Mulyadi (2001:218), akuntansi pertanggungjawaban “merupakan sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan serta pelaporan aset, biaya dan pendapatan dilakukan berdasarkan bidang pertanggungjawaban. Dengan maksud agar ditunjuk orang atau kelompok yang bertanggungjawab atas penyimpangan aset, biaya dan pendapatan yang dianggarkan”.

Pengendalian biaya-biaya yang akan di keluarkan dan mengurangi biaya- biaya yang tidak efektif dalam kegiatan organisasi perlu dilakukan untuk meminimalkan resiko. Penerapan akuntansi pertanggung jawaban oleh pemerintah daerah berguna dalam menunjang pengendalian biaya. Dengan adanya akuntansi pertanggungjawaban, pimpinan berhak dan memiliki tanggungjawab ketinggian pimpinan dibawah naungannya dengan lebih efisien tanpa memonitor secara langsung seluruh kegiatan didalam organisasi (Adharawati, 2010:3).

Fenomena yang terjadi yaitu kondisi pertanggungjawabannya tidak sesuai, kesenjangan antara anggaran dan pelaksanaan karena tingkat akuntabilitas tidak diurutkan dari terendah hingga tertinggi untuk masing-masing fungsi. Kurangnya perbedaan antara biaya terkendali dan tidak terkendali membuat sulit untuk menentukan anggaran dan siapa yang harus bertanggung jawab atas kondisi tersebut. Jadi akuntansi pertanggung jawaban harus diterapkan. Dari permasalahan tersebut Kantor Kecamatan Bontoa perlu untuk melakukan peningkatan pengelolaan keorganisasian, yaitu memperbaiki struktur organisasi yang sesuai dengan tugas dan tanggungjawab kepada pusat pertanggungjawaban yang dilakukan melalui anggaran. Anggaran tersebut dapat digunakan untuk

memantau Pusat Pertanggungjawaban dan merevisi tujuan pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Kantor Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros Sulawesi Selatan. Waktu penelitian dilakukan sekitar dua bulan mulai pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2021. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah jenis data kuantitatif dan kualitatif, dengan metode analisis deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Syarat-Syarat Akuntansi Pertanggungjawaban

Struktur organisasi

Struktur organisasi Kecamatan Bontoa adalah struktur organisasi yang fungsional karena dalam struktur organisasi tersebut terdapat pembagian kerja berdasarkan fungsinya masing-masing. Dari hasil wawancara Sekertaris Camat Bontoa mengatakan “struktur oragnisasi telah sesuai dengan tugas dan tanggungjawab setiap bagian sesuai peraturan Bupati No. 19 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi, fungsi dan tata kerja perangkat Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros” (Wawancara, 20 Juni 2021).

Dari uraian tersebut, maka syarat akuntansi pertanggungjawaban yang diterapkan di Kantor Kecamatan Bontoa tentang struktur organisasi telah memenuhi syarat akuntansi pertanggungjawaban.

1. Penyusunan Anggaran

Proses penyusunan anggaran pada Kecamatan Bontoa mengacu pada PP No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan rencana kerja 1 tahun. Tujuan penganggaran adalah untuk membantu manajemen dalam menentukan berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk setiap bagian atau kegiatan yang dilakukan dan dalam mencegah penggunaan dana organisasi dari penyimpangan. Dengan demikian maka syarat akuntansi pertanggungjawaban yang digunakan pada Kecamatan Bontoa telah sesuai dengan syarat akuntansi pertanggungjawaban.

2. Pemisahan Biaya Terkendali dan Tidak Terkendali

Kecamatan Bontoa telah melakukan pemisahan biaya terkendali dan tidak terkendali dengan cukup memadai sehingga dapat mengukur kinerja pegawai yang bersangkutan. Berdasarkan wawancara dengan informan bahwa”

“dalam penyusunan anggaran, dan penggunaan dana, pihak kami melakukan pemisahan antara biaya tetap dan biaya tidak tetap atau biaya tidak terduga” (Wawancara, 15 Juli 2021).

Oleh sebab itu syarat akuntansi pertanggungjawaban yang diterapkan pada Kecamatan Bontoa telah sesuai dengan syarat akuntansi pertanggungjawaban.

3. Laporan Pertanggungjawaban

Tabel 2
Laporan realisasi anggaran belanja pendapatan daerah tahun 2019

Deskripsi	Anggaran	Realisasi	%	Selisih
Program Penyediaan Dukungan Manajemen Perkantoran	298.238.500	275.931.100	93	22.307.400
Program Peningkatan Sarana Prasarana Kerja Aparatur	85.166.000	84.466.000	99	700.000
Program Peningkatan Aparatur Kedisiplinan	14.500.000	10.000.000	69	4.500.000
Program Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat	275.524.000	273.566.000	99	1.958.000
Program Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketenteraman Umum Masyarakat	9.095.000	9.095.000	100	-
Program Optimalisasi Penyelenggaraan	89.075.000	89.075.000	100	-

Pemerintahan Umum di Kecamatan Program Pembinaan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan	5.175.000	5.175.000	100	-
Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang sosial	102.625.000	97.225.000	95	5.400.000
Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Fasilitas pelayanan umum	714.638.000	701.538.947	98	13.099.053

(sumber: data sekunder, 2020)

- a. Realisasi Program Penyediaan Dukungan Manajemen Perkantoran pada tahun 2019 sebesar Rp. 275.931.100 dari anggaran sebesar Rp. 298.238.500 dengan persentase pencapaian 93%.
- b. Realisasi Program Peningkatan Sarana Prasarana Kerja Aparatur pada tahun 2019 sebesar Rp. 84.466.000 dari anggaran sebesar Rp. 85.166.000 mengalami selisih sebesar Rp. 700.000 dengan persentase 99%.
- c. Realisasi Program Peningkatan Kedisiplinan Aparatur sebesar Rp. 10.000.000 dari anggaran sebesar Rp. 14.500.000 mengalami selisih sebesar Rp. 4.500.000 dengan tingkat pencapaian 69%.
- d. Realisasi Program Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat sebesar Rp. 273.566.000 dari anggaran sebesar Rp. 275.524.000 mengalami selisih kurang sebesar Rp. 1.958.000 dengan tingkat pencapaian 99%.
- e. Realisasi Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang social sebesar Rp. 97.225.000 dari anggaran sebesar Rp. 102.625.000 mengalami selisih kurang sebesar Rp. 5.400.000 dengan persentase capaian 95%.
- f. Realisasi Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Fasilitas pelayanan umum sebesar Rp. 701.538.947 dari anggaran sebesar Rp. 714.638.000 dengan selisih Rp. 13.099.053 dan persentase capaiannya 98%.

Tabel 3
Laporan realisasi anggaran belanja pendapatan daerah tahun 2020

Deskripsi	Anggaran	Realisasi	%	Selisih
Program Penyediaan Dukungan Manajemen Perkantoran	242.347.000	240.496.000	99	1.851.000
Program Peningkatan Sarana Prasarana Kerja Aparatur	52.209.000	52.569.000	101	(360.000)
Program Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat	3.495.000	3.495.000	100	-
Deskripsi	Anggaran	Realisasi	%	Selisih
Program Penyelenggaraan Ketertiban Dan Ketenteraman Umum Masyarakat	15.530.000	15.530.000	100	-
Program Peningkatan Partisipasi Dan Pemberdayaan Masyarakat.	18.670.000	66.070.000	354	(47.400.000)
Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Di Kecamatan	268.169.000	267.469.000	100	700.000
Program Pembinaan Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan	2.568.000	2.393.000	93	175.000
Program Pembinaan Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam	42.970.000	44.210.000	103	(1.240.000)

Bidang Sosial Dan
Keagamaan

Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	693.000.000	0	0	-
Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	-	0	0	-

(sumber: data sekunder, 2021)

- a. Realisasi Program Penyediaan Dukungan Manajemen Perkantoran sebesar Rp. 240.496.000 dari anggaran sebesar Rp. 242.347.000 selisih senilai Rp. 1.851.000 dengan persentase capaiannya 99%.
- b. Realisasi Program Peningkatan Sarana Prasarana Kerja Aparatur sebesar Rp. 52.569.000 lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp. 52.209.000 sehingga mengalami selisih lebih sebesar Rp.360.000 dengan capaian 101%.
- c. Realisasi Program Peningkatan Partisipasi Dan Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 66.070.000 lebih tinggi dari anggaran senilai Rp. 18.670.000 sehingga pada tahun 2020 Program Peningkatan Partisipasi Dan Pemberdayaan Masyarakat termasuk yang paling tinggi selisihnya yaitu sebesar Rp 47.400.000 dengan persentase capaiannya 354%.

Dari data yang diperoleh terdapat selisih lebih yang terjadi pada tahun 2020. dari hasil wawancara kepada Sekertaris Camat Bontoa mengatakan bahwa dilakukan pergeseran anggaran pada tahun 2020 karena penyesuaian kebutuhan sebagaimana yang telah ditetapkan pada DPA (Dokumen Penyusun Anggaran) tahun berjalan. Dan tidak ada terjadi penyimpangan yang merugikan karena semua telah sesuai dengan yang direncanakan dan dianggarkan. Selisih lebih tersebut bukan karena terjadinya penyimpangan melainkan karena kondisi fisik yang kurang memadai sehingga terjadi penambahan biaya dan Tambahan Uang (TU).

Karakteristik akuntansi pertanggungjawaban

Identifikasi Pusat Pertanggungjawaban

Suatu pusat pertanggungjawabkan dibentuk untuk membantu pencapaian tujuan suatu organisasi sebagai suatu keseluruhan. Struktur organisasi Kecamatan Bontoa telah membagi bagian atas pusat- pusat pertanggungjawaban seperti pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba dan pusat investasi. Dalam penelitian ini pembahasan hanya dipusatkan terhadap pusat biaya, dimana Kecamatan Bontoa telah mengidentifikasi pusat biaya sebagai berikut: 1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ialah unsur penunjang urusan pemerintah pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 2) Bendahara pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa struktur organisasi Kantor Kecamatan Bontoa telah memenuhi salah satu karakteristik akuntansi pertanggungjawaban yaitu dengan adanya identifikasi pusat-pusat pertanggungjawaban sebagaimana mestinya.

Standar Pengukuran Kinerja

Anggaran merupakan salah satu standar dalam menilai kinerja pimpinan pusat pertanggungjawaban. Dalam penilaian kinerja pimpinan Kantor Kecamatan Bontoa dilakukan berdasarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi biaya. Pihak yang bertanggungjawab dalam penyelesaian masalah-masalah yang terjadi, dapat diketahui dari laporan pertanggungjawabannya.

Manfaat laporan pertanggungjawaban pusat biaya yaitu dapat dihindari adanya pemborosan atau kesulitan yang ada pada saat pelaksanaan kegiatan. Setiap tenaga kerja akan melaporkan kinerja setiap triwulan, semesteran serta tahunan. Laporan kinerja ini merupakan bagian dari hasil yang ingin dicapai dan telah dianggarkan serta kesulitan yang dialami setiap pegawai pada masing-masing pusat pertanggungjawaban.

Penetapan Ukuran Kinerja

Dalam penetapan ukuran kinerja berdasarkan anggaran Kantor Kecamatan Bontoa membuat dan menyusun anggaran berdasarkan permintaan kepala bagian yang telah disetujui bersama kepala bagian pusat biaya, kemudian di lanjutkan oleh bagian perencanaan dan keuangan kemudian disetujui oleh pimpinan instansi Kantor Kecamatan Bontoa yaitu Camat.

Anggaran sebagai tolak ukur dan pengendalian biaya karena setiap kegiatan atau kebutuhan akan berpatokan dengan anggaran sehingga pengendalian biaya dapat berjalan dengan baik.

Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban dengan Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Biaya

Akuntansi pertanggung jawaban adalah jenis informasi akuntansi manajemen yang mengalokasikan wewenang di antara manajemen yang bertanggung jawab. Akun pertanggungjawaban ini bertindak sebagai alat manajemen pengeluaran, menghubungkan biaya setiap bagian yang dikeluarkan oleh eksekutif yang bertanggung jawab untuk bagian itu. Pelaksanaan, perencanaan dan pengawasan kelembagaan memerlukan sistem pelaporan, dan setiap Pusat Pertanggungjawaban selalu menetapkan tujuan dan anggaran operasional. Dengan membandingkan implementasi dan anggaran, manajer Pusat Tanggung Jawab dapat memahami seberapa baik pengelolaan biaya berjalan.

Melalui akuntansi pertanggungjawaban, biaya dikelompokkan dan dilaporkan untuk setiap tingkatan manajemen yang hanya di bebani oleh biaya-biaya yang ada dalam pengendalian dan tanggungjawabnya. Oleh karena itu, pimpinan dapat melakukan pengawasan serta pengendalian terhadap pengeluaran biaya.

Dilihat dari teori-teori yang telah ada dari beberapa ahli dengan data-data yang diperoleh dari studi kasus dan wawancara di lapangan, maka dapat dinyatakan bahwa penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada Kantor Kecamatan Bontoa cukup memadai karena telah memenuhi syarat dan karakteristik akuntansi pertanggungjawaban.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan anggaran sebagai pusat informasi akuntansi pertanggungjawaban. Dengan hasil analisis

anggaran tersebut, maka dapat diketahui efisiensi dari pengendalian biaya yang telah dilaksanakan pada instansi tersebut.

Berdasarkan analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa biaya yang terjadi pada Kantor Kecamatan Bontoa sebagai salah satu pusat pertanggungjawaban dari pemerintah daerah Kabupaten Maros telah memenuhi syarat akuntansi Pertanggungjawaban.

1. Struktur organisasi berdasarkan teori menjelaskan bahwa struktur organisasi merupakan peraturan garis tanggungjawab dalam satu entitas yang disusun guna mencapai tujuan bersama orang-orang yang ada pada lingkup tersebut. Dalam akuntansi pertanggungjawaban, struktur organisasi menunjuk kepada tiap-tiap pimpinan yang kegiatannya secara jelas berada dibawah wewenangnya dan Kantor Kecamatan Bontoa menurut hasil wawancara telah membuat struktur organisasi sesuai dengan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan bagiannya masing-masing dan telah ditetapkan pada peraturan Bupati No 19 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi, fungsi dan tata kerja perangkat Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros.
2. Anggaran berdasarkan teori didefinisikan sebagai tolak ukur dalam perencanaan dan pengendalian dalam jangka pendek yang efektif. Dimana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Mengacu pada PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Pemisahan biaya berdasarkan teori terbagi antara biaya terkendali dan tidak terkendali. Biaya terkendali merupakan biaya yang dapat diatur secara langsung pada tingkat pimpinan tertentu atau dapat dipenuhi secara signifikan oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan, biaya tidak terkendali yaitu biaya yang dialokasikan kepada suatu pusat pertanggungjawaban dengan dasar yang tidak pasti, tidak dapat diberikan pertanggungjawaban kepada manajer yang bersangkutan sehingga biaya tersebut tidak dapat dikendalikan oleh manajer. Berdasarkan hasil wawancara Sekretaris Camat, Kantor Kecamatan Bontoa telah melakukan pemisahan antara biaya terkendali dan biaya tidak terkendali dan seluruh pengeluaran biaya telah diatur dengan sistem dan biaya-biaya

yang dikeluarkan telah tercatat dalam sistem sesuai dengan peraturan pemerintah.

4. Laporan pertanggungjawaban berdasarkan teori yaitu laporan dari pusat pertanggungjawaban kepada organisasi pusat yang memuat didalamnya biaya-biaya yang dianggarkan, realisasi anggaran, serta varians/selisihnya. Dari hasil penelitian pada Kantor Kecamatan Bontoa telah membuat laporan pertanggungjawaban berupa laporan realisasi anggaran dengan cukup memadai.
5. Pusat pertanggungjawaban didasarkan pada teori akuntansi pertanggungjawaban, di mana pusat pertanggungjawaban berada, dan manajemen bertanggung jawab untuk mengendalikan biaya dan membuat keputusan yang memengaruhi biaya tersebut. Kecamatan Bontoa merupakan salah satu Pusat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Maros dan merupakan Pimpinan Daerah Pusat Pertanggungjawaban tersebut.
6. Standar kinerja menurut teori ialah suatu alat penting dalam mengukur kinerja pimpinan pusat pertanggungjawaban. Dari hasil penelitian Kecamatan Bontoa telah melaksanakan standar kinerja sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dari hasil wawancara dengan Sekertari Camat mengatakan “standar penukaran kinerja pada Kantor Kecamatan Bontoa adalah terlaksanakan tugas dan tanggungjawab dari masing-masing bagian.
7. Pengukuran kinerja menurut teori, kinerja pimpinan dalam suatu organisasi diukur berdasarkan perbandingan anggaran dan realisasinya. Apabila realisasi lebih rendah daripada anggaran maka kinerja pimpinan dinilai baik, dan apabila realisasi lebih tinggi dari yang dianggarkan maka kinerja pimpinan dinilai kurang baik. Dari hasil penelitian Kecamatan Bontoa telah membuat laporan realisasi anggaran, sehingga dapat diukur kinerja pimpinan dari hasil perbandingan realisasi dan anggarannya, hal itupun dibenarkan oleh narasumber.

Implikasi Penelitian

Implikasi dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

Implikasi teoritis

Berdasarkan hasil analisis akuntansi pertanggungjawaban pada Kecamatan Bontoa, dapat dikatakan cukup memadai dan cukup efektif. Hal ini dikarenakan Kecamatan Bontoa telah menerapkan akuntansi pertanggungjawaban dengan cukup baik dengan memenuhi syarat-syarat dan karakteristik yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan beberapa teori yang diungkapkan para ahli:

1. Menurut Mulyadi (2001:218), akuntansi pertanggungjawaban merupakan sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan serta pelaporan aset, biaya dan pendapatan dilakukan berdasarkan bidang pertanggungjawaban. Dengan maksud agar ditunjuk orang atau kelompok yang bertanggungjawab atas penyimpangan aset, biaya dan pendapatan yang dianggarkan.
2. Menurut Simamora (2012:253) mengatakan bahwa akuntansi pertanggungjawaban adalah bentuk akuntansi khusus yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan suatu unit bisnis, dan pada dasarnya setiap manajer diharuskan untuk menyiapkan rencana keuangan untuk sektor tersebut dan memberikan laporan kinerja tepat waktu yang membandingkan hasil aktual dan yang direncanakan.
3. Menurut Samryn (2012:76), Akuntansi Pertanggungjawaban adalah sistem akuntansi yang digunakan oleh manajer untuk mengukur kinerja setiap Pusat Pertanggungjawaban terhadap informasi yang diperlukan untuk mengoperasikan Pusat Pertanggungjawaban sebagai bagian dari sistem pengendalian manajemen.

Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini digunakan sebagai alat masukan bagi para pimpinan dalam menyusun struktur organisasi sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing, menyusun laporan realisasi anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian biaya, melakukan pemisahan antara biaya terkendali dan biaya tidak

terkendali, membuat laporan pertanggungjawaban dengan laporan realisasi anggaran serta pusat pertanggungjawaban dapat meningkatkan kinerjanya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada Kantor Kecamatan Bontoa mengenai Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban dengan Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Biaya, maka penulis menarik kesimpulan:

1. Bahwa syarat-syarat dan karakteristik dalam penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada Kecamatan Bontoa telah terpenuhi karena telah sesuai syarat-syarat dan karakteristik akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan teori yang telah ada.
2. Akuntansi pertanggungjawaban juga berperan penting dalam pengendalian biaya karena dalam pertanggungjawaban terdapat pusat biaya dimana pimpinan di berikan tanggungjawab untuk mengendalikan biaya dan untuk mengambil keputusan yang mempengaruhi biaya tersebut.

Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada Kantor Kecamatan Bontoa, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam meningkatkan penyusunan anggaran biaya, sebaiknya dilakukan pemisahan secara jelas antara biaya terkendali dengan biaya yang tidak terkendali untuk memudahkan dilakukan pengawasan.
2. Dalam laporan pertanggungjawaban, sebaiknya melaporkan penyebab terjadinya selisih lebih pada anggaran sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan laporan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Adharawati, Atena. (2010). Penerapan akuntansi pertanggungjawaban dengan anggaran sebagai alat pengendalian biaya. *skripsi universitas diponegoro*.
- Amin, Fadillah, (2019). *Penganggaran Di Pemerintahan Daerah*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Anthony, R. N., dan Govindrajan, V. (2005). *Sistem Pengendalian Manajemen. Buku 1 Edisi 11*. Jakarta: Salemba Empat.
- Atkinson, Rajiv D. Banker, Robert S. Kaplan, Mark Young (2009). *Akuntansi Manajemen, Edisi 5, Jilid 1 (diterjemahkan Miranti Kartika Dewi)*. Jakarta: PT. Indeks.
- Daljono. (2009). *Akuntansi Biaya: Penentuan Harga Pokok dan Pengendalian*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Freeman, R. J, dan C. D. Shoulder. (2003). *Governmental and Nonprofit Accounting - Theory and Practice. Seventh edition*, New Jersey : Prentice Hall.
- Hansen, D. R., dan Mowen, M. M. (2006). *Cost Management: Accounting and Control, Fifth Edition*. Australia: South Western Collage Publishing.
- _____. (2005). *Akuntansi Manajerial buku2 edisi 7*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. (2009). *Akuntansi Manajerial buku1 edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hariadi, B. (2002). *Akuntansi Manajemen Suatu Sudut Pandang*. Yogyakarta: BPF.
- Havid, A. R. (2007). *Peranan Anggaran Biaya Operasi dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Biaya Operasi (Studi Kasus pada PT. Kereta Api)*. Bandung: Skripsi Universitas Widyatama.
- Hilton, R. W., Michael W. Maher., Frank H. Selto. (2003). *Managerial Accounting: Creating Value A Dynamic Business Environment, 7th Edition*. New York: The McGraw- Hill Companies. Inc.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2009). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mandak, A. (2013). *Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban dengan Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Biaya*. Universitas Sam Ratulangi Manado: Jurnal Emba Vol.1 No.3.
- Mukhzarudfa., dan W.E. Putra (2019). *Akuntansi Manajemen sebuah pengantar*. Jambi: Salim Media Indonesia.

- Mulyadi. (2001). *Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat dan Rekayasa*. Jakarta: Salemba Empat.
- Munandar, M. (2001). *Budgeting. Perencanaan Kerja Pengkoordinasian Kerja Pengawasan Kerja*. Yogyakarta: BPFE: Universita Gajah Mada.
- Rosidah, Euis., Medina Almunawwarah., dan Rina Marlina. (2018). *Akuntansi Mnajemen*. Bandung: Mujahid Press.
- Samryn, L. (2012). *Akuntansi Manajemen (Informasi Biaya Untuk Mengendalikan Aktivitas Operasi dan Investasi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Simamora, H. (2012). *Akuntansi Manajemen, Edisi III*. Jakarta: Star Gate Publisher.
- Sulastri. (2019). *Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Pengendalian Anggaran Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang*. skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar